

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arief, B. N. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.
- Kansil, C. S. T. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). Teori-Teori dalam Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Nawawi, S. (1986). Hukum Pidana dan Perkembangannya. Bandung: Sinar Baru.
- Quinney, R. (1970). The Social Reality of Crime. Boston: Little, Brown and Company.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.
- Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soehino. (1990). Hukum Tata Negara: Teknis Perundang-Undangan. Yogyakarta: Liberty.
- Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jilid I). Jakarta: Prapantja.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun tentang Angkutan Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Prosedur Pemeriksaan Kelaikan Kapal.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

Hasil Penelitian dan Laporan

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (2018). Laporan Investigasi Kecelakaan KM Sinar Bangun. Jakarta: KNKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/2005.

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blg dalam perkara KM Sinar Bangun.

Peraturan Perundang-Undangan di Luar Indonesia

International Maritime Organization (IMO). (1974). International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).

International Maritime Organization (IMO). (1978). International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

International Labour Organization (ILO). (2006). Maritime Labour Convention (MLC).

